

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam menyelenggarakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pemerintah yang meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM).

DISPERKIM Pati dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana Perangkat Daerah lainnya, DISPERKIM merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam operasionalisasi organisasinya, DISPERKIM mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan ini, DISPERKIM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun fungsi yang melekat adalah sebagai berikut::

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang

- perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

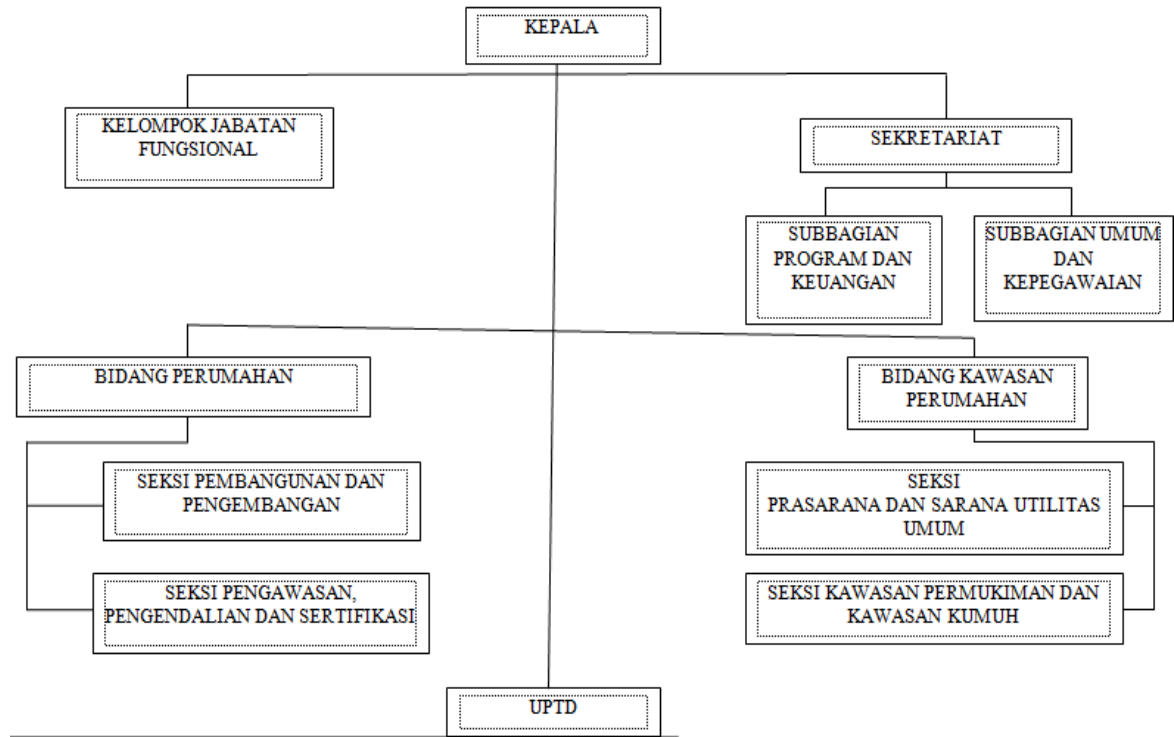
2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, dengan 2 (dua) Subbag, yaitu Subbag Program dan Keuangan dan Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan, dengan 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pembangunan dan Pengembangan serta Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Sertifikasi
4. Bidang Kawasan Permukiman, dengan 2 (dua) Seksi, yaitu: Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum serta Seksi Kawasan Permukiman dan Kawasan Kumuh
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Adapun struktur kelembagaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Gambar II.1



Berdasarkan Peraturan tersebut, masing-masing unit kerja memiliki tugas dan fungsi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.1:

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati

Tugas	Fungsi
Sekretariat	
Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Subbidang Umum dan Kepegawaian, serta Subbidang Program dan Keuangan; b. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, serta hokum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang Perumahan	
Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pembangunan dan pengembangan dan kegiatan pengawasan, pengendalian dan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan, serta kegiatan pengawasan, penendalian dan sertifikasi. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan, sreta kegiatan pengawasan, pengendalian dan sertifikasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan, serta kegiatan pengawasan, pengendalian dan sertifikasi; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas	Fungsi
Bidang Kawasan Permukiman	
Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan prasarana dan utilitas umum, serta kegiatan kawasan permukiman dan kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana utilitas umum, serta kegiatan kawasan permukiman dan kawasankumuh; b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan prasarana dan sarana utilitas umum, serta kegiatan kawasan permukiman kumuh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana utilitas umum, serta kegiatan kawasan permukiman dan kawasan kumuh; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Sumber : Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain berkaitan dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Tabel di atas, DISPERKIM selaku Perangkat Daerah berusaha untuk selalu menempatkan diri dan memposisikan organisasinya sesuai dengan kapasitas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DISPERKIM memiliki ruang lingkup kewenangan sebagai berikut :

Tabel II.2

Urusan Konkuren Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Berdasarkan UU 23 tahun 2014

No	Sub Urusan	Pemerintah pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	2	3	4	5
1	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional; c. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Pusat; d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2	Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sistem kawasan permukiman; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih. 	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.; b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.
4	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman.	Penyelenggaraan PSU permukiman.	Penyelenggaraan PSU perumahan.

No	Sub Urusan	Pemerintah pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	2	3	4	5
5	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Sumber : Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati. Per bulan Desember 2017 sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berjumlah 47 orang terdiri dari PNS sejumlah 28 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 19 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 28 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 8 perempuan. Jumlah pejabat struktural 10 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 2 perempuan. Lebih lanjut, khusus untuk komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut :

Tabel II.3

Jumlah PNS pada Kantor DISPERKIM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	SD	-			1		1						
2	SMP												
3	SMA				4		4	1		1	4		4
4	D1/ D2/ D3				1	1	2						
5	D4												
6	S1				1	1	2	2	3	5	1	1	2
7	S2	1		1		1	1	3		3	1	1	2
8	S3												
Jumlah		1		1	7	3	10	6	3	9	6	2	8
		1		10			9			8			
28													

Tabel II.4

Jumlah PNS pada Kantor DISPERKIM Menurut Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	I				1								
2	II				4	1		1		1	4		
3	III				2	2		5	3	8	2	2	
4	IV	1		1	7	3	10	6	3	9	6	2	8
Jumlah		1		1	7	3	10	6	3	9	6	2	8
		1			10			9			8		

Tabel II.5

Jumlah Pejabat Struktural DISPERKIM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	D3/ D4	-	-	-	1	0	2	0	0	0	0	0	0
2	S1	-	-	-	0	1	1	2	0	2	1	0	1
3	S2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	2
4	S3	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1	-	1	1	1	1	3	0	3	2	1	3
		1			3			3			3		
10													

Tabel II.6

Jumlah Pejabat Struktural DISPERKIM Menurut Golongan Tahun 2017

No	Golongan	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	III				1	1	2	2		2	1	1	2
2	IV	1		1	1		1	1		1	1		1
Jumlah		1		1	2	1	3	3		3	2	1	3
		1			3			3			3		
10													

Tabel II.7

Jumlah PNS pada Kantor DISPERKIM Menurut Pengalaman Mengikuti Ke-DIKLAT-an Tahun 2017

No	Jenis Diklat	Kepala Dinas			Sekretariat			Bidang Perumahan			Bidang Kawasan Permukiman		
		L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
1	Diklat Teknis				1	1	2	3	1	4	2	1	3
2	Diklat Fungsional					1	1						
3	Diklat Struktural	1		1	2		2	3		3	1	1	2
4	Lainnya												
Jumlah		1		1	3	2	5	6	1	7	3	2	5
		1			5			7			5		
18													

Sumber : Mekanisme Pegawai DISPERKIM 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Pati sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Pati sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel II.8
Data Sarana dan Prasarana Disperkim Tahun 2017

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Cukup Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	3 unit	3		
2	Kendaraan roda empat	6 unit station wagon 2 unit pikc up	4	3	1
3	Kendaraan roda dua	5 unit			5
4	Laptop	7 unit	3	4	
5	Printer	3 unit	3		
6	Independence meter	1 buah	1		
7	Lemari besi	1 buah	4		
8	Rak besi/metal	1 buah	4		
9	Filling besi/metal	7 buah	7		
10	Kursi kerja	23 buah	23		
11	Kursi tamu	2 set	1		
12	Meja tulis	21 buah	21		
13	Kursi putar	1 buah	1		
14	Kursi lipat	62 buah	62		
15	Mesin finger print	1 buah	1		
16	AC Spit	7 buah	7		

Sumber : Data Inventaris Kantor DISPERKIM Tahun 2017

Kondisi sarana prasarana yang berupa infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab pelayanan DISPERKIM Kabupaten Pati meliputi tanah, tanah, bangunan/ gedung, jalan/ ruas jalan, saluran air/ drainage, instalasi air bersih, gardu/ tiang/ instalasi/ jaringan listrik, dan infrastruktur lain, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel di bawah :

Tabel II.9

Daftar Sarana dan Prasarana DISPERKIM Kabupaten Pati Tahun 2017

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran		Keterangan
1	2	3		4
1	Tanah Bangunan Terminal Laut	3,720.00	m2	Bangunan Rusunawa
2	Tanah Bangunan Terminal Laut	2,094.00	m2	Bangunan Rusunawa
3	Tanah Bangunan Terminal Laut	2,843.00	m2	Bangunan Rusunawa
4	Tanah Jalan	13,825.00	m2	Jl. BTN Sukoharjo
5	Tanah Jalan	13,895.00	m2	Jl. Lingk RSS Sidokerto
6	Tanah Jalan	9,975.00	m2	Lingk. Perum Wisma Giri Asri
7	Tanah Jalan	9,398.00	m2	Jl. Lingk BTN Gembleb
8	Tanah Jalan	18,468.00	m2	Jl. Lingk BTN Rendole
9	Tanah Jalan	7,020.00	m2	Jl. Lingk BTN Winong
10	Tanah Jalan	37,650.00	m2	Jl. Lingk Perum Kutoharjo
11	Tanah Jalan	10,229.00	m2	Jl. Lingk Perum Gunung Bedah Permai
12	Tanah Jalan	2,558.00	m2	Jl. Lingk Perum GWIB 2
13	Tanah Jalan	7,887.00	m2	Jl. Lingk Perum Rendole Indah 2
14	Tanah Jalan	2,467.00	m2	Jl. Lingk Kebun Bibit Buah
15	Tanah Jalan	3,019.00	m2	Jl. Lingk Puri Baru Permai
16	Tanah Jalan	9,719.00	m2	Jl. Lingk. Puri Baru Permai
17	Tanah Jalan	11,860.80	m2	Jl. Lingk. BTN Rendole
18	Tanah Jalan	2,665.25	m2	Jl. Lingk. Perum GWIB 1
19	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	2,904.00	m2	Tanah Lap. Olahraga BTN Rendole Indah
20	Pompa Lain-lain	2.00	Unit	Pompa Air (Fasum perumahan Gunung Bedah Permai Margorejo)
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	840.00	m2	Taman (Plaza) (Fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
22	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	837.00	m2	Gedung Pertemuan (Fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
23	Gedung Pos Jaga Permanen	100.00	m2	Pos Kampling (Fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
24	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	540.00	m2	Tempat parkir (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
25	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	692.00	m2	Tempat Parkir Aspal (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
26	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	769.00	m2	Tempat bermain (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
27	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	791.00	m2	Taman (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
28	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1.00	Unit	Gapura Masuk (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
29	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1.00	Unit	Tower Air (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
30	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1.00	Unit	Gapura (fasum) di Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds.

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran		Keterangan
1	2	3		4
				Winong Kec. Pati
31	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	58.00	m2	Pos Kampling (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	8.00	m2	Pool Bak Sampah (Fasum), 8 buah di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
33	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	20.00	m2	Pembuatan Ground Reservoir Rusunawa
34	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	10.50	m2	Gapura di Perum Rendole Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
35	Flat/Rumah Susun Permanen	294.00	m2	Penataan Lingkungan Rusunawa
36	Jalan Kabupaten Lokal	515.00	m2	Jl. Perumahan Winong Pati
37	Jalan Kabupaten Lokal	1,479.00	m2	Jl. Perum RSS Sidokerto
38	Jalan Kabupaten Lokal	1,650.00	m2	Jl. Perum Bukit Rendole Asri Rt. 06 Rw. 02 Kec. Margorejo
39	Jalan Kabupaten Lokal	3,376.00	m2	Jl. Perumahan Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
40	Jalan Kabupaten Lain-lain	7,342.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Pondok Wijaya Kusuma Gembleb Ds. Kutoharjo Kec. Pati
41	Jalan Kabupaten Lain-lain	6,865.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
42	Jalan Kabupaten Lain-lain	30,707.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
43	Jalan Kabupaten Lain-lain	14,581.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
44	Jalan Kabupaten Lain-lain	7,262.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
45	Jalan Kabupaten Lain-lain	1,695.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
46	Jalan Kabupaten Lain-lain	2,906.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
47	Jalan Kabupaten Lain-lain	7,288.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
48	Jalan Kabupaten Lain-lain	1,866.00	m2	Jalan Lingkungan (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
49	Jalan Kabupaten Lain-lain	2,720.00	m2	Jalan Akses di Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
50	Jalan Kabupaten Lain-lain	3,220.50	m2	Jalan Lingkungan di Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
51	Jalan Kabupaten Lain-lain	528.00	m2	Jl Lingkungan lebar 10 m di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
52	Jalan Kabupaten Lain-lain	3,376.00	m2	Jalan Lingkungan Lebar 7 m di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
53	Jalan Kabupaten Lain-lain	4,197.80	m2	Jalan Lingkungan Lebar 5 m di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran		Keterangan
1	2	3		4
54	Jalan Kabupaten Lain-lain	516.00	m2	Jalan akses di Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
55	Jalan Kabupaten Lain-lain	1,324.75	m2	Jalan Lingkungan di Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
56	Gorong-gorong	9.70	m2	Gorong-gorong (fasum)(BM 2016) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
57	Saluran Drainase	155.00	m2	Drainase/Saluran (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
58	Saluran Drainase	341.00	m2	Saluran Type S1 (fasum) di Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
59	Saluran Drainase	628.00	m2	Saluran Type S2 (fasum) di Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
60	Saluran Drainase	1,255.00	m2	Saluran Type S3 (fasum) di Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
61	Saluran Drainase	128.00	m'	Saluran MD (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
62	Saluran Drainase	3,759.00	m'	Saluran U beton dan pas bata (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
63	Saluran Drainase	450.00	m'	Saluran MD 50 (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
64	Saluran Drainase	283.00	m'	Saluran MD 30 (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
65	Saluran Drainase	2,234.00	m'	Saluran Buis U 20 (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
66	Saluran Drainase	720.00	m'	Saluran buis U-20 (fasum) di Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
67	Saluran Drainase	143.00	m'	Saluran MD 40 (fasum) di Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
68	Saluran Drainase	66.00	m'	SaluranMD 60 (fasum) di Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
69	Saluran Drainase	30.00	m'	Saluran MD 60 (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
70	Saluran Drainase	59.00	m'	Saluran MD 80 (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
71	Saluran Drainase	510.00	m'	Saluran MD 120 (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
72	Saluran Drainase	584.00	m'	Saluran U 30 (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran		Keterangan
1	2	3		4
73	Saluran Drainase	17.00	m2	Saluran MD 30 dan Plat Penutup Beton (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
74	Saluran Drainase	362.00	m2	Saluran MD 60 (fasum) di Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
75	Saluran Drainase	208.00	m2	Saluan MD 30 (fasum) di Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
76	Saluran Drainase	3,209.00	m2	saluran U 20 (fasum) di Perumahan Puri Baru Permai Ds. Puri Kec. Pati
77	Saluran Drainase	3,759.00	m2	Saluran U (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
78	Saluran Drainase	92.50	m2	Saluran MD 30 (fasum) di Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
79	Saluran Drainase	732.00	m2	Saluran U 30 (fasum) di Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
80	Saluran Drainase	300.00	m'	Drainase Got U-30 (fasum)(BM 2016) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
81	Saluran Drainase	80.00	m'	Saluran 50 (fasum)(BM 2016) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
82	Krib Pengaman Talud/Pantai	103.00	m'	Talud (fasum) di Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
83	Krib Pengaman Talud/Pantai	89.00	m'	Talud Penahan Tebing (fasum) di Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
84	Krib Pengaman Talud/Pantai	38.00	m'	Talud (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
85	Krib Pengaman Talud/Pantai	169.40	m'	Talud (fasum)(BM 2016) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
86	Sumur Artesis	32.00	m2	Sumur Artetis (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
87	Sumur Artesis	-	-	Sumur Artetis (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
88	Sumur Gali (SGL)	-	-	Sumur gali (fasum) di Perumahan Rendole Indah Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
89	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1.00	Unit	Penyambungan air dari PDAM Rusunawa Bumiharjo di Ds. Bumiharjo Juwana
90	Instalasi Air Bersih Lain-lain	266.00	Unit	Jaringan Pipa air bersih (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
91	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	164.00	KVA	Penyambungan Gardu Induk dan Jaringan Listrik Rusunawa di Ds. Bumiharjo Juwana
92	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	-	-	BM 2016 di Rusunawa Kec. Juwana
93	Jaringan Distribusi Lain-lain	266.00	Unit	Jaringan listrik PLN (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong

No	Nama/ Jenis Barang	Ukuran	Keterangan
1	2	3	4
			Kec. Pati
94	Jaringan Distribusi Lain-lain	23.00 Titik	Lampu PJU 80 VA/450 (fasum) di Perumahan Winong Ds. Winong Kec. Pati
95	Jaringan Distribusi Lain-lain	47.00 Titik	Lampu Penerangan Jalan Umum (fasum) di Perumahan Kutoharjo (Depan Alugoro) Ds. Kutoharjo Kec. Pati
96	Jaringan Distribusi Lain-lain	20.00 Titik	Lampu Penerangan Jalan (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
97	Jaringan Distribusi Lain-lain	27.00 Tiang	Jaringan Listrik (fasum) di Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo
98	Jaringan Distribusi Lain-lain	4.00 Titik	lampu Jalan PJU (fasum) di Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati
99	Jaringan Distribusi Lain-lain	3.00 Unit	Tiang Listrik dan Jaringan (fasum) di Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
100	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.00 Unit	Travo 50KVA (fasum) di Perumahan Baru Permai 2 Ds. Puri Kec. Pati
101	Jaringan Distribusi Lain-lain	5.00 Buah	Tiang Listrik beton (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
102	Jaringan Distribusi Lain-lain	2.00 Unit	Travo 50KVA (fasum) di Perumahan Rendole Indah 2 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo
103	Jaringan Distribusi Lain-lain	3.00 Buah	Pal Listrik (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
104	Jaringan Distribusi Lain-lain	320.00 m'	Kabel Jaringan (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
105	Jaringan Distribusi Lain-lain	1.00 Unit	Travo 50KVA (fasum) di Perumahan Kebon Bibit Buah Ds. Sidokerto Kec. Pati
106	Jaringan Distribusi Lain-lain	3.00 Buah	Pengadaan Lampu PJU di Perumahan GWIB 1 Ds. Winong Kec. Pati
107	Tanaman Holtikultura Lain-lain	250.00 Btg	Pohon Pelindung Perumahan Gunung Bedah Permai Ds. Pegandan Kec. Margorejo (fasum)
108	Tanaman Holtikultura Lain-lain	70.00 Btg	Penghijauan glodok pecut Perumahan Griya Winong Indah Baru 2 Ds. Winong Kec. Pati (fasum)

Sumber : Data Aset Disperkim Kab. Pati Tahun 2017

Melihat rincian isian Tabel di atas, nampak bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang menjadi asset DISPERKIM adalah sebatas dalam lingkungan perumahan-perumahan yang PSUnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Data hingga akhir 2017, baru 12 Perumahan yang telah menyerahkan PSUnya kepada Pemerintah Daerah. Adapun PSU di lingkungan permukiman

diluar perumahan-perumahan formal, seperti pada lingkungan kelurahan dan/atau kawasan perkotaan lainnya saat ini sedang dalam pembahasan untuk terbukanya peluang penyerahan penyelenggaraan urusan tersebut kepada DISPERKIM.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Pati pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja $\geq 91\%$
- 2) Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja $\geq 76\%$ dan $\leq 90\%$
- 3) Sedang, apabila tingkat capaian kinerja $\geq 66\%$ dan $\leq 75\%$
- 4) Rendah, apabila tingkat capaian kinerja $\geq 50\%$ dan $\leq 65\%$
- 5) Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x \leq 50\%$

Berdasarkan pengukuran capaian kinerja tersebut, capaian kinerja DISPERKIM di awal tahun berdirinya, dapat digolongkan tinggi karena total capaian rata-ratanya sebesar 89,23%, dimana sebagian besar target indikator kinerja telah dapat dipenuhi. Pada realisasi capaian di tahun 2017, indikator lingkungan permukiman kumuh memiliki capaian 76,31 % dengan angka realisasi 4,96% dari target 6,5%. Indikator rumah layak huni memiliki capaian 95,25% dengan angka realisasi 91,44% dari target 96%. Indikator rumah tangga pengguna air bersih memiliki capaian 87,5% dengan realisasi 74,36% dari target 85%.

Indikator rumah tangga bersanitasi memiliki capaian 97,89% dengan realisasi 93% dari target 95%. Secara lengkap capaian data ini tercantum dalam Tabel berikut :

Tabel 10
Capaian Kinerja DISPERKIM Tahun Anggaran 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lingkungan, sarana dan prasarana air bersih serta pemukiman layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman	Lingkungan permukiman kumuh (%)	%	6,5	4,96	76,3	Tinggi
		Rumah layak huni (%)	%	96	91,44	95,3	Sangat Tinggi
		Persentase penduduk berakses air minum / Rumah tangga pengguna air bersih (%) **)	%	85	71,36	84	Tinggi
		Persentase Rumah tangga berakses listrik (%) *)	%	97	99,46	103	Tinggi
		Rumah tangga berakses sanitasi layak (% **)	%	95	93	97,9	Sangat Tinggi

Catatan : *) sebatas penyampian informasi hasil olah data dari berbagai sumber, karena terkait listrik ini tidak menjadi urusan DISPERKIM
 **) di awal penyelenggaraan organisasi, jenis layanan ini dilekatkan dan diampu pelayanannya oleh DISPERKIM selama setahun (2017)

Sumber : LKjIP DISPERKIM Tahun 2017, Januari 2018

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, organisasi, dan struktur DISPERKIM, kondisi umum capaian kinerja layanan yang dapat dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel II.11

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PATI**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra						Realisasi Capaian						Rasio Capaian					
	Perangkat Daerah Tahun ke-						Tahun ke-						pada Tahun ke-					
	1 (2012)	2 (2013)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	6 (2017)	1 (2012)	2 (2013)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	6 (2017)	1 (2012)	2 (2013)	3 (2014)	4 (2015)	5 (2016)	6 (2017)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lingkungan permukiman kumuh (%)	9.2	8.7	8.3	7.8	7.4	6.5	0	0	0.01	0.09	0.08	4.96	0.00%	0.00%	0.12%	1.15%	1.08%	76.3%
Rumah Pengguna Air bersih (%)	55	65	70	75	80	85	43	43	12	13	11	71.36	78.2%	66.2%	17.1%	17.3%	13.8%	84.0%
Rumah tangga pengguna listrik (%)	87.5	88.5	89	90	95	97	23.07	23.10	99.7	99.68	99.48	99.49	26.4%	26.1%	112%	111%	105%	103%
Rumah tangga bersanitasi (%)	72	74	79	83	87	95	10	10	71	71	71	93	13.9%	13.5%	89.9%	85.5%	81.6%	97.9%
Rumah layak huni (%)	86	88	90	92	94	96	25	25	71	74	91	91.44	29.1%	28.4%	78.9%	80.4%	96.8%	95.3%

Sumber : RPJMD Kabupaten Pati 2012-2017

Berdasarkan Tabel di atas, tiga indikator kinerja utama, yaitu : persentase Rumah Tangga pengguna air bersih, persentase Rumah Tangga pengguna listrik, dan persentase Rumah Tangga bersanitasi masih dicantumkan karena di awal berdirinya organisasi ini atau pada tahun pertama penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman, dua jenis diantaranya dilaksanakan oleh DISPERKIM (air bersih dan sanitasi) dan khusus untuk Rumah Tangga berakses listrik hanya sekedar dilekatkan karena kedekatan fungsi dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman. Hal ini bisa dipahami, mengingat DISPERKIM merupakan Perangkat Daerah baru, kemudian pada awal penyelenggaraan kegiatannya mengacu kepada DPA atau alokasi anggaran yang sudah ditentukan (given).

Dengan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya untuk pencermatan hasil capaiannya hanya difokuskan pada 2 (dua) indikator utama lainnya, yaitu : **persentase permukiman kumuh** dan **persentase capaian rumah layak huni**. Dalam Tabel tersebut, terdapat rasio capaian 0 % (indikator persentase permukiman kumuh pada Tahun ke-1 dan Tahun ke-2. Ini dikarenakan target yang ditentukan pada tahun yang sama tidak terealisasi, sehingga tidak ada hasil yang dicapai. Pada akhir periode RPJMD 2012-2017, capaian indikator kinerja pada tugas dan fungsi pelayanan yang pertama (persentase permukiman kumuh) menunjukkan tingkat **tinggi**, sedangkan untuk indikator yang kedua: persentase rumah layak huni menunjukkan kualitas pelayanan yang **sangat tinggi**.

Jika dilihat secara berurutan, rasio capaian untuk indikator yang pertama nampak perubahan yang drastis pada tahun ke-5 menuju Tahun ke-6. Dari angka 1,08 % ke angka 76,3 %. Dalam hal ini, intervensi fisik yang sesungguhnya memang baru terlihat pada pelaksanaan Tahun 2017, dimana Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya (urusan konkuren terkait penanganan kawasan kumuh, yaitu untuk luasan di atas 15 hektar) melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang berada di Desa Bajomulyo, Kudukeras, dan desa Bendar Kecamatan Juwana. Beberapa kegiatan fisik, seperti pembuatan rabat beton, perbaikan drainage, hingga pembuatan Ruang Terbuka Hijau, cukup memberikan nilai positif, terutama dalam pengurangan luasan kumuh. Inilah yang kemudian secara mencolok membedakan dengan capaian pada empat tahun sebelumnya, yang relatif belum ada intervensi kegiatan penanganan kumuh secara langsung.

Selain penanganan kumuh yang bersifat kawasan, ada juga penanganan yang bersifat lingkungan, dimana pada Tahun yang sama, beberapa desa yang masuk SK Kumuh Bupati (sebanyak 11 Desa di 3 Kecamatan : Bendar, Bajomulyo, Kudukeras, Pajeksan, Kauman, dan Growong Lor Kecamatan Juwana; Desa Sambiroto Kecamatan Tayu; serta Cebolek Kidul, Bulumanis Lor, Sekarjalak, dan Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso) diintervensi dengan Bantuan Dana Investasi (BDI) yang juga bersumber dari APBN.

Kedua penanganan kumuh yang diterangkan di atas dilaksanakan di wilayah kecamatan yang masuk dalam dampingan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perlu diketahui bahwa jumlah desa di Kabupaten Pati yang masuk kriteria kumuh adalah sebanyak 22 Desa di 7 wilayah kecamatan. Sebanyak 18 (delapan belas) desa di empat kecamatan masuk dalam area dampingan Program KOTAKU dan 4 (empat) desa lainnya di tiga kecamatan yang berbeda, berada di luar wilayah dampingan Program KOTAKU.

Dari intervensi penanganan kumuh tersebut, dihasilkan pengurangan luasan kumuh sebanyak 9 hektar dari total luasan sebanyak 181,58 Ha di Kabupaten Pati. dengan demikian sisa luasan kumuh di akhir periode RPJMD sebelumnya (2012-2017) yang menjadi target awal pada RPJMD kali ini (2017-2022) menjadi 172,58 Ha. Dengan asumsi bahwa pada periode sebelumnya hanya mampu “mengentaskan” 9 hektare luasan kumuh dengan alokasi anggaran didominasi dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan hasil capaian indikator utama berupa persentase permukiman kumuh, nampak bahwa masih banyak lokasi kumuh yang belum ditangani, sehingga wajar pula jika menyisakan luasan kumuh yang juga masih cukup banyak.

Berkaitan dengan indikator yang kedua, hasil capaian yang sangat tinggi diantaranya diperoleh karena penyusunan target yang tidak terlalu membebani organisasi. Beberapa catatan penting terkait hasil capaian ini adalah :

- 1) jika melihat data dasar yang dimiliki DISPERKIM, tercatat kebutuhan rumah layak huni pada Tahun 2016 adalah sebanyak 111.796 unit, yang terdiri dari data *backlog* sejumlah 78.518 dan data RTLH sebanyak 33.278 unit. Jumlah ini tentu saja menunjukkan angka yang luar biasa jika ditilik dari kemampuan anggaran Pemerintah Daerah setempat.

- 2) dengan pertimbangan kondisi tersebut maka penetapan targetnya tidak asal-asalan, sehingga dengan realisasi capaian pemenuhan rumah layak huni (RLH) sebanyak 1.949 (terdiri dari 1.449 RTLH yang ditingkatkan kualitasnya menjadi RLH dan pembangunan rumah baru sebanyak 500 unit) telah menunjukkan hasil yang sangat tinggi (LKjIP DISERKIM, 2017)
- 3) capaian pemenuhan rumah layak huni yang berasal dari upaya peningkatan kualitas RTLH menjadi RLH, yaitu sebanyak 1.449 unit pada Tahun 2017, diintervensi dari tiga sumber : DAK bidang Perumahan, Bansos APBD Provinsi Jateng, dan sumber APBD Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk Kabupaten Pati masih menyisakan banyak sekali “pekerjaan rumah” pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, yaitu sebanyak 109.847 unit (78.018 backlog dan 31.829 RTLH), yang juga harus dilanjutkan penanganannya pada masa periode RPJMD selanjutnya (2017-2022).

Selain *review* di atas, dilakukan juga *review* terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan DISPERKIM guna melengkapi evaluasi capaian kinerjanya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada DISPERKIM Kabupaten Pati. Berdasarkan data Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK Bulan Desember 2017 yang dilaporkan 2 Januari 2018) pelaksanaan kegiatan APBD pada DISPERKIM Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 tercatat rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran selama Tahun 2017 mencapai 89,70%.

Adapun untuk melihat kinerja layanan DISPERKIM dari sisi pengelolaan pendanaannya, dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel II.12a

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PATI**

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)				
		1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pengembangan Perumahan	0	1,086,000	469,148	806,524	2,697,699	0	1,065,456	430,970	801,803	2,559,720
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	3,573,735	2,925,125	2,535,781	852,000	100,000	3,449,693	3,319,216	2,482,903	696,794	0
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	0	0	115,000	115,000	230,000	0	0	114,953	114,872	138,586
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	60,000	383,900	929,000	71,620	93,500	54,729	378,705	804,623	66,118	91,943
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	71,500	69,074	269,074	100,000	100,000	39,110	48,137	69,055	99,810	66,647
6	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	0	0	0	0	6,082,315	0	0	0	0	5,738,912

Sumber : RFK DPU Tahun 2013-2016 dan RFK Disperkim Tahun 2017

Tabel T II.12b

PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
		1(2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	Rata-rata	1(2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pengembangan Perumahan	100	-56.80	71.91	234.48	87.40	100.00	-147.22	46.25	68.68	16.93
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	-18.15	-13.31	-66.40	-88.26	-46.53	-3.93	-33.68	-256.33	0.00	-73.49
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	0	0	100.00	0.00	25.00	0.00	100.00	-0.07	17.11	29.26
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	539.83	141.99	-92.29	30.55	155.02	85.55	52.93	-1116.95	28.09	-237.59
5	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	-3.39	289.54	-62.84	0.00	55.83	18.75	30.29	30.81	-49.76	7.52
6	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tabel II.11a

Review atas pencapaian kinerja pelayanan Disperkim tersebut masih mendasarkan pada program kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait. Tahun 2017 merupakan tahun adaptasi dimana kegiatan-kegiatan yang merupakan manifestasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, yang semestinya menjadi kewenangan Perangkat Daerah asal (DPUTR), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baru hasil pemecahan dari Perangkat Daerah asal. Pada saat evaluasi SOTK, dan dimulainya perencanaan anggaran dan kegiatan tahun berikutnya, pelaksanaan kegiatan sudah menyesuaikan dengan lingkup kewenangan tugas dan fungsi yang semestinya melekat pada DISPERKIM, dan selanjutnya ketiga layanan yang terkait dengan indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, dan rumah tangga bersanitasi diserahkan kembali ke Perangkat Daerah yang secara teknis berwenang melaksanakan tugas dan fungsi terkait. Beberapa program seperti : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah serta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sudah tidak lagi berada di DISPERKIM.

2.3.2 Jenis Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan PD secara jelas dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dibebankan pada suatu PD. Dari tugas dan fungsi serta organisasi dan bagan struktur organisasi tersebut, tersirat bahwa secara garis besar dinas ini harus dapat memberikan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan kebijakan teknis yang telah dirumuskan.

Pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/gorong-gorong, infrastruktur di perumahan yang sudah di serahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, prasarana dasar permukiman termasuk rusun dan penataan kawasan kumuh.

Umumnya pelayanan ini bersifat sebagai pendukung kegiatan masyarakat dan bertujuan untuk menjaga agar sarana prasarana yang menjadi kewenangan dinas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjalankan pelayanan tersebut, terdapat 2 bidang dan satu UPT, yaitu (1) Perumahan fokus layanan berkaitan dengan penyediaan rumah layak huni, (2) Kawasan Permukiman dengan fokus layanan berkaitan dengan

lingkungan hunian yang sehat (prasarana, sarana utilitas umum) dan (3) UPT Rumah Susun.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain, kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multidimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang bagi upaya peningkatan kinerja layanan DISPERKIM Kabupaten Pati, yang harus bisa diintegrasikan penanganannya ke dalam program dan kegiatan selama lima tahun kedepan. Tantangan dan peluang ini dapat dirinci menurut bidang teknisnya, sebagai berikut:

1. Tantangan Bidang Perumahan :
 - a. Trend pembangunan yang tidak ramah lingkungan, yang diindikasikan dengan adanya alih fungsi lahan
 - b. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan
 - c. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman, berikut infrastrukturnya
 - d. Iklim usaha pembangunan perumahan masih belum dapat memaksimalkan seluruh potensi; dan
 - e. Proses perubahan RTRW Kabupaten Pati berpotensi mengubah peruntukan dan luasan kawasan, termasuk penentuan lokasinya
 - f. Dampak bencana alam yang sulit diprediksi terhadap kepastian kuantitas dan kualitasnya guna penentuan alokasi dan kegiatan yang harus segera ditangani

Adapun peluang pada bidang ini diantaranya adalah :

- 1) Kebutuhan rumah dan animo masyarakat terhadap penyediaan perumahan sangat tinggi
- 2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Meningkatnya koordinasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman
- 4) Komitmen Daerah yang tinggi dalam penyediaan layanan dasar

2. Tantangan Bidang Kawasan Permukiman :

- a. Genangan air pada beberapa titik lokasi di kawasan perkotaan
- b. Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat untuk tidak menghargai lingkungan hidup
- c. Perlu peningkatan kondisi untuk pemenuhan kualitas permukiman yang baik dan Pengembangan potensi permukiman untuk mendorong ekonomi
- d. Angka kelahiran dan urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kepadatan yang tak terkendali
- e. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara prasarana dan sarana permukiman belum optimal

Sedangkan peluang yang ada pada bidang ini diantaranya meliputi :

- 1) Peran masyarakat yang sangat antusias dalam penyediaan Sarana Prasarana dan Utilitas Permukiman.
- 2) Banyaknya *stakeholders* yang terlibat dalam pembangunan terhadap peningkatan kualitas lingkungan
- 3) Komitmen Daerah yang tinggi dalam penataan kawasan seiring dengan akselerasi percepatan pembangunan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat dan dinamikanya

Pada akhirnya, sebagaimana telah digambarkan dalam Tabel II.2 terkait *urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal yang terkait dengan:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten;

- 2) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- 3) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten
- 4) Penyelenggaraan PSU perumahan
- 5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- 6) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;

juga bisa dijadikan sebagai peluang untuk tetap melanjutkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan oleh DISPERKIM maupun penambahan dan/atau pengembangan strategi guna memunculkan strategi baru dengan penambahan dan/atau pengembangan kegiatan-kegiatan yang baru.